

KEBUDAYAAN LOKAL DAN PEMBERDAYAANNYA

Bambang Hidayana*

Abstract

This paper underlines the importance of local culture as a basis to empower the Indonesian society which, during the era globalization and the late of capitalism attempt to engage in a process of reform based on a cultural diversity. The modernist regime of the New Order has undermined local culture and treat it as the enemy of development and national integration, so that many local cultures have been weakening. Many cases, indeed, show that local cultures have played an important role in empowering local people as they provide alternatives for solving the weaknesses of development. Many local cultures have social-political value, and furthermore they have also economic value which can be managed to enhance welfare among the marginal people. Local cultures give an arena for the marginal people to actualize their potential, self-esteem, and creativity due to the fact that traditionally and historically these cultures became the bases of socio-cultural identity creation among the local people that live the pluralistic and competitive system. It is expected that the empowerment of local culture arise in near future as a part of the agenda of regional autonomy, globalization and late capitalism era. The process of empowerment will strengthen the spirit of pluralism and national solidarity.

Kata kunci: *Kebudayaan lokal, pemberdayaan kebudayaan lokal.*

Sai Pengajar Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UGM dan Peneliti pada Pusat Penelitian Kebudayaan dan Perubahan Sosial UGM, Yogyakarta.

Pendahuluan

Era globalisasi merupakan suatu agenda politik yang bersentuhan dengan masalah pengembangan kebudayaan lokal. Sesungguhnya ketika Orde Baru berkuasa, konstitusi juga sudah mengamanatkan adanya pengembangan kebudayaan daerah alias kebudayaan lokal. Akan tetapi, Orde Baru nampaknya memandang pengertian kebudayaan dengan membatasinya sebagai sesuatu yang bernilai seni. Lagi pula Orde Baru juga lebih berorientasi pada pengembangan kebudayaan nasional dengan menciptakan homogenisasi kebudayaan serta melihat penguatan kebudayaan daerah sebagai suatu ancaman disintegrasi.

Dibandingkan Orde Baru yang mereproduksi modernisme, era globalisasi lebih memberikan kesempatan bagi menguatnya gerakan penguatan kebudayaan lokal. Globalisasi memang membuka proses homogenisasi kebudayaan sejagad, tetapi juga membuka terjadinya pruralisme kebudayaan karena bisa menjadi sarana bagi merebaknya kapitalisme ke penjuru dunia. Mengikuti Jameson (1991) era globalisasi sama dengan postmodernisme yaitu ketika "ekonomi lebih berbudaya." Di sini Jameson melihat bahwa jaman kapitalis akhir (*late capitalism*) lebih diisi dengan komoditas kebudayaan. Lewat pasar kebudayaan mengalir dari produsen ke konsumen dan kebudayaan itu bukan hanya bentukan dari industri kebudayaan di pusat-pusat peradaban tetapi juga di berbagai penjuru dunia yang terakit dalam pasar global. Sementara itu, arus reformasi dan khususnya semangat kedaerahan juga membuka peluang bagi bangkitnya kebudayaan lokal sebagai suatu kekuatan yang bisa memperkuat jati diri masyarakat lokal dengan segala tuntutananya ketika berhadapan dengan masyarakat luar.

Tulisan ini akan memaparkan pengertian dan lahirnya wacana tentang kebudayaan lokal serta implikasi kebijakan ke depan di tengah berkembangnya era globalisasi dan reformasi yang membawa semangat kedaerahan. Diharapkan tulisan ini bisa memberikan bahan perbincangan dalam mengembangkan kebudayaan lokal di era pergolakan kebudayaan di tingkat global dan lokal tersebut.

Kebudayaan Lokal

Berbicara tentang kebudayaan lokal, kiranya tidak bisa melepaskan dari konsepsi tentang kebudayaan itu sendiri. Walaupun beragam pemakanaannya, ada kecenderungan bahwa kebudayaan diartikan sebagai sistem simbol yang dipakai manusia untuk memaknai kehidupan. Sistem simbol ini berisi orientasi nilai, sudut pandangan tentang dunia (*worldview*), sistem pengetahuan, dan pengalaman kehidupan (Spardley, 1979). Sistem simbol itu terekam dalam pikiran yang dapat diaktualisasikan dalam bahasa tutur, tulisan, lukisan, sikap, gerak dan tingkahlaku serta benda-benda budaya.

Kebudayaan lokal juga beragam maknanya. Namun ada semacam kesepakatan di kalangan para ahli untuk mengartikan kebudayaan lokal secara luas yaitu sebagai suatu kebudayaan yang secara eksklusif milik masyarakat etnik (*ethnic society*) dan mereka ini hidup di tengah bangsa dan umat manusia sejagad. Oleh karena itu berbicara kebudayaan lokal tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan nasional dan global. Kita mengenal kebudayaan Jawa, Bunda, Asmat dan Alor. Istilah itu menunjukkan kebudayaan milik masing-masing suku bangsa dan mereka hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia dengan kebudayaan nasional dan global. Pengertian kebudayaan lokal dapat dipersempit pada tingkat kelompok pendukungnya bukan pada tingkat etnik, melainkan pada tingkat sub-etnik, misalnya pada orang Jawa kemudian dilihat kelompok lebih kecil, yaitu orang Samin di hutan Blora.

Sebagai suatu yang secara eksklusif milik suatu suku bangsa, kebudayaan lokal merupakan hasil dari proses adaptasi mereka terhadap lingkungan alam dan sosialnya. Beberapa aspek kebudayaan lokal tersebut mungkin berupa warisan dan reproduksi dari nenek moyang sebelumnya, penemuan baru dan akulturasi dari budaya asing. Orang Honduras, misalnya mengenal tradisi kontes kecantikan yang disemarakkan dari tingkat desa sampai dengan ibukota. Tradisi ini asalnya dari penjajah, tetapi kini lebih bernuansa lokal karena secara tipikal menjadi tradisi orang Honduras (Wilk, 1995).

Seperti kebudayaan pada umumnya, kebudayaan lokal sebagai suatu milik diri masyarakat berfungsi sebagai identitas mereka di

engah pergaulan antar masyarakat yang majemuk. Sebagai identitas, kebudayaan menjadi penting bagi pembentukan kepribadian dan harga diri. Pakaian adat Solo dan Yogya berbeda bukan sekedar menunjukkan kreativitas seni yang berlainan, tetapi pada gilirannya mengungkapkan bahwa mereka itu hidup dalam komunitas yang berbeda. Kesetiaan, kecintaan dan keakraban orang Solo atau Yogya dengan komunitasnya disimbolkan dengan pilihan pakaian masing-masing yang tidak dapat dicampuradukkan begitu saja.

Kebudayaan lokal sebagai suatu yang eksklusif milik suatu masyarakat yang bersangkutan ditunjukkan oleh kenyataan bahwa kebudayaan tersebut merupakan hasil proses adaptasi jangka panjang dan telah terbukti memberikan manfaat bagi kepentingan mereka dari segi ekonomi, sosial, budaya dan ekologi. Sama seperti konsep kebudayaan yang berkembang dalam aliran ekologi budaya, kebudayaan merupakan alat untuk beradaptasi sehingga ia merupakan alat untuk memecahkan masalah (Spradley, 1979). Tradisi gotong-royong pada orang Jawa, misalnya, merupakan alat untuk memecahkan masalah kelangkaan tenaga di musim sibuk kegiatan pertanian (Hidayana, 1991).

Perguliran Wacana Kebudayaan Lokal

Dalam wacana pembangunan, konsep kebudayaan lokal menjadi isu yang penting dan mengundang perdebatan yang seru di kalangan para analis dan praktisi. Wacana itu muncul sejak pembangunan itu dicanangkan di negara-negara berkembang dan terbelakang tepatnya setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pembangunan dijadikan sebagai suatu pilihan strategis negara terbelakang dan berkembang untuk mencapai kehidupan modern seperti negara Barat. Pembangunan sering diidentikkan dengan istilah *westernisasi*, meskipun keduanya berbeda konteks (Koentjaraningrat, 1980). Penyamaan itu sedikit benar dalam arti pembangunan itu merupakan suatu proses transformasi sosial-budaya dalam masyarakat berkembang dan terbelakang dengan belajar dari proses yang telah terjadi di negara Barat sebelumnya.

Modernisasi di negara berkembang dan terbelakang telah membawa konsekuensi yang luas terhadap berbagai kehidupan

ekonomi, politik dan sosial-budaya. Modernisasi mengunggulkan ilmu pengetahuan ilmiah dan teknologi modern sebagai instrumen yang terpenting dalam mewujudkan masyarakat modern. Sebaliknya, modernisasi melecehkan dan melemahkan peran pengetahuan dan teknologi tradisional yang dipandang sebagai sumber keterbelakangan masyarakat. Modernisasi berusaha mengubah kebudayaan lokal yang bersifat tradisional dengan kebudayaan yang bersifat modern (Foster, 1980).

Hingga tahun 1970-an, modernisasi mengarah pada upaya pelembagaan ilmu pengetahuan ilmiah dan teknologi modern dalam kehidupan masyarakat di negara yang sedang melakukan pembangunan seperti negara terbelakang dan berkembang. Di Indonesia, modernisasi juga menunjukkan kesan tersebut. Banyak pengetahuan dan teknologi tradisional tersingkir dan diganti dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sistem pertanian tradisional terjalin erat dengan lembaga gotong-royong yang dekat dengan model ekonomi subsisten kemudian diganti dengan sistem pertanian *a la* Revolusi Hijau yang sangat *profit oriented*. Transformasi teknologi pertanian membawa perubahan yang sangat besar di pedesaan seperti (1) meningkatnya produksi pertanian, dan (2) meningkatnya kesejahteraan petani dalam arti tidak lagi ditemukan kelaparan. Transformasi ini juga membawa konsekuensi yang luas, yaitu: (1) muncul dan meningkatnya kerusakan ekologis, (2) meningkatnya kesenjangan ekonomi antar petani kaya dan miskin karena akses terhadap Revolusi Hijau lebih kuat pada petani kaya, dan (3) meningkatnya komersialisasi ekonomi yang menyebabkan petani makin makin sulit memperoleh jaminan sosial dalam komunitasnya (White, 1989).

Proses transformasi masyarakat melalui alih ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa pembangunan telah menjadi perhatian yang serius di kalangan para analis dan praktisi pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat lokal dan lapisan masyarakat bawah. Begitu banyak contoh bahwa pembangunan itu hanya berpihak bagi kepentingan elite, dan kelas menengah serta bias kapitalisme. Melembaganya kesehatan modern, misalnya, telah menghidupkan peran obat tradisional seperti jamu dan tenaga kesehatan lokal diganti dengan dokter dan tenaga paramedis (Rienks

dan Iskandar, 1985). Pengetahuan dan produksi obat-obatan modern dimonopoli oleh rezim kapitalis yang mengeruk keuntungan yang besar dari modernisasi di bidang kesehatan tersebut.

Sejak tahun 1980-an, mulai banyak publikasi tentang kebobrokan modernisasi yang telah menggilas kebudayaan lokal dengan menggunakan instrumen ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Banyak kegagalan program pembangunan untuk memecahkan masalah yang serius seperti kemiskinan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal (Dove, 1985b). Penolakan terhadap program pembangunan muncul di kalangan masyarakat lokal karena tidak membawa keuntungan baginya. Pertanian lestari yang memperkenalkan kembali teknik bercocok-tanam tradisional dengan varitas lokal, misalnya, merupakan suatu contoh penolakan masyarakat yang tidak puas terhadap Revolusi Hijau. Mode pertanian ini sangat rawan terhadap kegagalan panen dan sangat tergantung pada pasar yang dikuasai kaum kapitalis (Sutapurwana, 1998)

Wacana kebudayaan lokal juga hadir seiring dengan munculnya wacana kebudayaan nasional. Sesuai dengan amanat konstitusi, bangun kebudayaan nasional dirumuskan sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah. Akan tetapi, dalam proses pengembangannya ada indikasi bahwa Orde Baru tidak menempatkan kebudayaan-kebudayaan lokal secara sederajat. Ada kecenderungan bahwa dalam pengembangan kebudayaan nasional terdapat bias kebudayaan Jawa. Bahasa Indonesia, misalnya terlalu kaya dengan kosa kata bahasa Jawa dan terjadi proses Javanisasi kuat sekali tidak hanya dalam bahasa tetapi juga dalam pemerintahan, pertanian dan lainnya. Ketika itu pula, banyak kebudayaan lokal mengalami marginalisasi karena perhatian pemerintah lebih pada pengembangan kebudayaan nasional guna menjadi alat pemersatu bangsa.

Wacana tentang kebudayaan lokal juga muncul ketika proses pembangunan di Indonesia berlangsung dengan hadirnya kebudayaan massa di perkotaan. Para pengamat kebudayaan telah melihat terjadinya kehancuran kesenian daerah karena merebaknya kesenian populer. Pelecehan terhadap kesenian yang berbau etnik dan kedaerahan muncul di awal industrialisasi. Kini kebanyakan orang Indonesia di perkotaan menjadi konsumen kebudayaan populer

atau massa seperti mengkonsumsi sajian seni, makanan yang diproduksi oleh industri kapitalis².

Kekuatan Kebudayaan Lokal

Keunggulan kebudayaan lokal sebagai suatu yang bermakna bagi masyarakat pendukungnya dan memberi arti penting bagi pemberdayaan ekonomi, harga diri dan kelangsungan solidaritas komunitas dirangkum dalam beberapa uraian di bawah ini.

Adaptasi Ekologis dan Kelestarian Lingkungan

Banyak antropolog yang menemukan sistem teknologi tradisional dengan keunggulan yang sangat tidak diragukan dalam menjamin kelestarian lingkungan (Nash, 1968). Hampir semua sistem teknologi tradisional, karena bersifat padat-karya, tidak bersifat eksploitatif terhadap lingkungan sehingga kelangsungan ekosistem dapat menjamin keberlangsungan hidup populasi. Oleh karena itu, masuk akal bila sistem teknologi tradisional pada kelompok suku kecil yang lemah dalam menghadapi tekanan eksternal tetap dilestarikan karena menjadi tumpuan bagi keberlanjutan mereka di tengah kehidupan yang kompetitif dan eksploitatif terhadap sumberdaya alam.

Beberapa contoh teknologi tradisional adalah sistem perladangan, dan sistem sawah *surjan*. Pada masa Orde Baru, pemerintah mendorong masyarakat Dayak untuk mengganti sistem perladangan dengan sistem pertanian sawah atau pertanian lahan bering menetap. Pertama-tama, perladangan itu dimitoskan oleh pemerintah sebagai pengrusak hutan, mengancam kelestarian

² Kebudayaan massa berkaitan dengan kemajuan industri dan dikembangkan oleh kapitalisme sehingga ia sering disebut budaya komoditas. Kebudayaan populer merupakan industri kebudayaan (Ibrahim, 1996). Artinya, kebudayaan itu diciptakan, dirancang dan diproduksi dan kemudian disebarluaskan ke dalam kehidupan masyarakat. Massa dituntut untuk berperilaku konsumtif demi kelangsungan industri ini. Setiap produk diciptakan agar dibutuhkan oleh massa yang besar. Untuk itu, industri melakukan (1) standarisasi (2) penyeragaman produk budaya (*ide, bentuk dan selera*) serta massa diastralkan, dan (3) penyeragaman selera dan cita rasa.

lingkungan dan tidak produktif (Dove, 1985a). Tidak kurang presiden pun mengajak peladang untuk bercocoktanam menetap dan tidak membakar hutan. Kenyataan menunjukkan bahwa kebakaran hutan di Kalimantan merupakan akibat dari ulah para pemegang HPH. Penelitian Dove mengungkapkan bahwa peladang sangat terampil membakar hutan yang hanya menjadi haknya tanpa menyebabkan kebakaran di ladang tetangganya. Mereka dapat dengan cermat menentukan musim yang tepat melakukan penebangan kayu dengan arah yang tepat, dan pembakaran berhasil baik sehingga menghasilkan pupuk untuk menyuburkan tanah. Sebaliknya, para pengusaha pemilik HPH (Hak Penguasaan Hutan) dengan karyawannya tidak mengetahui saat membakar yang tepat. Akibatnya, pada tahun 1997 terjadi kebakaran yang besar di Kalimantan dan titik api menjalar dari lokasi para pemegang HPH bukan dari para peladang.

Perladangan merupakan kreatifitas manusia yang sangat arif dengan lingkungannya, menciptakan ladang bagaikan miniatur hutan yang senantiasa terjaga kelestarian ekosistemnya seperti ekosistem hutan lindung (Geertz, 1976). Para peladang setiap tahunnya harus berpindah dari satu ladang ke ladang baru karena kesuburan tanah di ladang yang dibuka sangat rendah. Ladang hanya mampu ditanami tiga kali berturut-turut, sehingga untuk mendapatkan lahan subur peladang harus membuka hutan lindung atau primer untuk dijadikan ladang. Sistem ladang berpindah ini tidak membuat lingkungan rusak. Peladang akan membuka tanah sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya. Bekas ladang akan tumbuh kembali menjadi hutan yang dapat berfungsi memelihara kelestarian ekosistem hutan (Dove, 1985a).

Mitos kedua adalah perladangan bersifat subsisten sehingga tidak menambah devisa negara, mitos yang tidak mengandung kebenaran. Dove (1985b) mencatat bahwa perladangan sangat berjasa bagi negara. Peladang menanam karet, merica, lada dan tanaman komoditi lainnya yang sangat laku di pasar internasional. Mitos itu telah memperpuruk peran peladang dalam perekonomian nasional sehingga akses mereka ke pasar dan lembaga perkreditan sangat rendah. Kalau pemerintah memberikan penghargaan kepada peladang sama seperti petani di Jawa pada umumnya, maka mereka

tidak tergusur tetapi justru semakin kuat dan memberikan sumbangan yang besar bagi ekspor tanaman komoditi.

Kasus kedua adalah sistem sawah *surjan*. Dewasa ini, keberadaan sawah *surjan* telah diterima dan dihargai oleh pemerintah. Sebelumnya, sawah *surjan* dianggap sebagai suatu bentuk penyimpangan Revolusi Hijau yang mengejar produktivitas maksimal sawah padi *monocropping*. Sawah *surjan* sebaliknya menekankan diversifikasi tanaman dan tanaman palawija menjadi andalan utama untuk menjamin keberlangsungan usaha tani. Sawah *surjan* terdiri atas petak tanah yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian pinggir dengan direndahkan permukaan tanahnya untuk tanaman padi sedangkan bagian tengah yang permukaan tanahnya ditinggikan dipakai untuk tanaman palawija dengan sistem tumpangsari seperti cabai, brambang, dan sayuran.

Di Kulonprogo sistem sawah *surjan* sudah lama muncul jauh sebelum pemerintah memperkenalkan sawah padi *monocropping*. Pemerintah membiarkan penduduk tetap menggunakan sistem sawah *surjan*, meskipun tidak menghasilkan padi secara optimal karena sawah ini terjaga dari serangan hama wereng. Sawah padi konvensional menghendaki penanaman secara intensif, setahun dua kali bahkan tiga sampai empat kali kalau menggunakan varitas unggul. Pada masa Revolusi Hijau, penanaman secara intensif berdampak sangat buruk. Rotasi penanaman yang intensif menyebabkan hama terus menjalar dari satu sawah ke sawah lainnya.

Sistem sawah *surjan* merupakan penemuan asli masyarakat setempat yang diakui oleh para ahli sebagai sistem pertanian yang sangat adaptif terhadap lingkungan (Kodiran dan Hidayana, 1989). Sistem ini merupakan respons petani terhadap kondisi ekologis khususnya lokasi tanahnya yang rawan banjir tetapi juga kekurangan air pada musim kemarau. Oleh karena itu, ada bagian tanah yang digundukkan agar terhindar dari genangan air dan gundukan tanah ini ditanami palawija yang tidak membutuhkan air yang banyak pada musim kemarau. Sistem pertanian ini juga menyerap tenaga kerja yang tinggi, lebih tinggi daripada pertanian sawah padi *monocropping* serta meningkatkan peran wanita dalam pertanian dan rumah tangga (Kodiran dan Hidayana, 1989).

Akses Bersama terhadap Sumberdaya Alam dan Sosial

Kebudayaan lokal merupakan suatu produk dari masyarakat yang menjunjung nilai-nilai komunitarian. Hal ini nampak dari manajemen pengelolaan sumberdaya alam yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Di masyarakat Dayak hutan primer merupakan hutan milik publik yang dapat diakses oleh setiap warga. Peningkatan jumlah penduduk akan teratasi sejauh masih ada hutan primer yang kemudian dimanfaatkan untuk ladang. Selain itu, setiap komunitas peladang Dayak biasanya mempunyai hak ulayat, yaitu tanah yang dijadikan milik komunal yang penggarapannya dapat didistribusikan kepada anggota yang membutuhkannya.

Manajemen pengelolaan sumberdaya alam yang bersifat produk budaya lokal kian terancam dengan adanya kepentingan nasional dan kaum kapitalis. Eksistensinya makin rapuh karena kurangnya dukungan politik dan kuatnya kepentingan penguasa di pusat untuk mencaplok wilayah kekuasaan masyarakat lokal. Dewasa ini, kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sumberdaya alam yang bersifat komunitarian itu bangkit kembali seiring dengan tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah.

Semangat komunitarian sebagai salah satu spirit dari budaya lokal dapat terwujud bila didukung oleh adanya institusi-institusi dalam komunitas yang mengatur kebersamaan. Di pedesaan, semangat ini tetap hidup karena masih terlihat dari adanya lembaga-lembaga gotong-royong, seperti ronda, arisan, dan *sambatan* dalam peristiwa kematian, perkawinan dan sebagainya.

Perlawanan Terhadap Keterasingan Sosial-budaya

Sulit bagi setiap orang meninggalkan kebudayaannya dan kemudian memasuki kehidupan dengan menggunakan kebudayaan orang lain sebagai bagian dari identitas kulturalnya. Setiap orang akan mudah mempertahankan sebagian dari nilai, sikap dan perilaku budaya dari suku atau bangsanya meskipun telah meleburkan dirinya ke dalam budaya orang lain. Para migran yang menetap di perkotaan, misalnya, meskipun sudah meleburkan diri ke dalam kehidupan baru dengan menyerap budaya populer masih mempertahankan budaya daerahnya. Mereka ini masih menggunakan bahasa ibunya, dan

sering pula mengkonsumsi makanan daerah dan bergaul dengan orang yang sederhana.

Kecenderungan mempertahankan budaya daerah oleh para migran yang meninggalkan kampung halamannya merupakan suatu yang penting bagi mereka sebagai suatu upaya untuk menghilangkan keterasingan budaya dan sosial di rantau. Dengan demikian mereka menjadi betah atau *kerasan* di tengah kehidupan kota yang semakin individualistik.

Dewasa ini, ancaman keterasingan budaya dan sosial dapat dialami oleh sebagian warga masyarakat di daerahnya karena adanya arus budaya asing. Mereka masih bisa bergaul dengan teman dengan menggunakan bahasa daerahnya serta mengkonsumsi makanan yang tidak asing baginya. Namun mereka semakin sulit menikmati musik dan seni pertunjukan dari daerahnya. Mereka merendahkan musik tradisional dari daerahnya yang semakin langka. Oleh karena itu, di tengah maraknya seni musik *a la* budaya populer dan seni film yang ke barat-baratan, muncul seni tradisional yang sudah tidak banyak penggemarnya. Kelompok masyarakat tertentu menghidupkan seni tradisional itu misalnya *macapat*, *angguk*, *kuda lumping*, dan sebagainya. Upaya melestarikan seni musik dan pertunjukan tradisional itu merupakan respon dari mereka terhadap semakin terasingnya hidup di daerahnya.

Gejala revitalisasi budaya daerah mengalami perkembangan yang relatif pesat pada era globalisasi ini. Globalisasi telah menawarkan budaya konsumtif yang menggiring manusia untuk mengkonsumsi barang sebagai sarana bagi pembentukan identitas diri yang bernuansa masyarakat maju. Dengan membiasakan makan McDonald, konsumen dibawa pada citra kelas menengah yang sukses dan citarasa internasional. Gejala globalisasi semacam itu menghadapi resistensi oleh sekelompok masyarakat yang berusaha kembali kepada basis budayanya. Mereka kemudian mereproduksi budaya makan seperti *lesehan* dengan citra makanan daerah sehingga lebih bernuansa kedaerahan dan akrab dengan lingkungan sosialnya. *Lesehan* kemudian bisa mencuat menjadi komoditas budaya ketika masuk dalam jamuan makan di hotel-hotel berbintang.

Banyak studi telah mengungkapkan menguatnya kebudayaan lokal pada masa kini di tengah merebaknya globalisasi.³ Friedman (1994) mengungkapkan bahwa orang asli Hawaii bersatu untuk memulihkan kebudayaan asli yang kini menjadi objek tontonan pariwisata. Selama berabad-abad orang Hawaii terkungkung dalam lingkaran kebudayaan orang Barat. Mereka mensosialisasikan diri ke dalam kehidupan orang Barat, tetapi tetap tertinggal kemajuan sosial-ekonominya dibanding orang Barat. Oleh karena itu, mereka kemudian kembali ke kebudayaannya, menghidupkan kembali kebudayaannya yang sudah lama mereka tinggalkan, dan bersatu membentuk komunitas orang Hawaii lengkap dengan wilayah dan sarana sosial yang diperlukan.

Hampir sama dengan orang Hawaii, orang Ainu juga berusaha kembali kepada budaya lokal. Mereka telah berabad-abad hidup di bawah dominasi bangsa Jepang. Mereka menjadi tenggelam dalam kebudayaan Jepang, tetapi hidupnya dalam kondisi yang marginal. Kini orang Ainu berusaha menghidupkan budaya nenek moyangnya untuk menunjukkan identitas bagi kelompoknya. Keberanian merevitalisasi budaya kelompoknya menyebabkan mereka malah disegani di lingkungan masyarakat Jepang (Friedman, 1994). Benda budaya etnik yang bernuansa suku Ainu dikonsumsi oleh orang Jepang sebagai barang yang sangat berharga.

Penguatan Ekonomi Masyarakat Lokal

Kebudayaan lokal bukan sekedar kreativitas pikiran dan imajinasi manusia yang tidak mempunyai nilai dan kepentingan ekonomi. Kebudayaan lokal memberikan identitas dan harga diri sekaligus potensi bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Sebagai sebuah aktivitas ekonomi, kebudayaan lokal berbasis pada

³ Proses globalisasi merebak berkat kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan transportasi. Arus informasi menjaral dengan cepat tanpa mengenal selisih waktu dari satu wilayah ke wilayah lain. Globalisasi identik dengan merebaknya kebudayaan populer dalam arti terjadinya proses standarisasi produk, massalisasi produk dan penyeragaman cita dan rasa. Kebudayaan di dunia semakin seragam wujud dan pemaknaannya. Globalisasi juga mengandung arti meningkatnya konsentrasi kekuatan kapitalisme dunia yang menciptakan budaya konsumtif dengan cara menawarkan suatu kebudayaan populer.

potensi sosial-budaya yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Bahkan tidak itu saja, ia juga berbasis pada sumberdaya alam setempat sehingga mengungkapkan kekuatan ekonomi rakyat setempat.

Salah satu contoh yang paling menonjol untuk mengungkapkan kekuatannya bagi pemberdayaan ekonomi rakyat adalah peran kebudayaan lokal sebagai suatu komoditi pariwisata di Bali. Dalam menganalisis pariwisata di Bali, Picard (1996) mengungkapkan bahwa wacana tentang pariwisata di Bali di lingkungan para akademisi dan budayawan serta pengusaha selalu mengarah pada pelestarian, pengembangan dan bahkan penguatan kebudayaan Bali. Keberhasilan pariwisata di Bali diukur dari kemampuan mencapai tiga hal tersebut. Tanpa peduli terhadap soal tersebut, maka Bali akan ditinggalkan wisatawan yang datang untuk menikmati pesona kebudayaannya. Kini dengan pariwisata, orang Bali membangun kebudayaannya dan pariwisata budayanya telah mengantarkan orang Bali sukses dalam memasuki pasar pariwisata global. Tidak itu saja, orang Bali mampu membangun kebudayaannya yang hidup dalam lingkungan kebudayaan nasional dan global (Picard, 1993). Di sini kebudayaan Bali bukan ancaman bagi kebudayaan daerah di Indonesia dan integrasi nasional. Eksklusifitas kebudayaan Bali di dalam kerangka integrasi nasional lebih dipahami sebagai bagian dari kekayaan kebudayaan milik bangsa Indonesia dan bahkan bangsa lain yang menemukan pesona keajaiban kebudayaan orang Bali.

Contoh kedua adalah pilihan wanita India dan Timor mempertahankan pakaian adat. Mereka tetap memakai pakaian tradisional yang diproduksi oleh industri padat-karya. Demikian pula, wanita desa tetap memakai pakaian seperti kebaya dan batik sebagai pakaian tradisional yang tidak usang ditelan mode-mode yang silih berganti, sehingga mereka tidak tergantung dari pengaruh pasar dunia yang mendorong untuk berperilaku konsumtif.

Contoh ketiga adalah merebaknya jamu dan obat-obatan tradisional. Merebaknya jamu dan obat-obatan tradisional pada masa kini, terutama masa krisis merupakan jawaban atas mahalnya obat-obatan modern yang belum tentu mujarab. Pemerintah pun menyadari bahwa paling tidak obat-obatan tradisional dapat dipakai sebagai alternatif pengobatan di tengah mahalnya obat impor. Dengan

digalakkannya penggunaan obat tradisional, maka yang memperoleh keuntungan terutama masyarakat lapisan bawah, khususnya petani serta pedagang kecil yang menyalurkan tanaman tersebut ke pedagang lebih besar. Pengusaha lokal juga akan kecipratan rejeki dengan melembaganya penggunaan obat tradisional untuk pengobatan. Dalam kasus tanaman obat ini masih banyak tumbuhan yang belum dikomoditisasikan karena kurangnya kepekaan pasar memahami pengetahuan lokal tentang kasiat tumbuhan tersebut.

Agenda Pemberdayaan Kebudayaan Lokal

Para peneliti melalui Lembaga Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional telah berupaya melakukan penelitian inventarisasi kebudayaan lokal. Akan tetapi, upaya mereka belum cukup memadai dan belum cukup memuaskan untuk diimplementasikan bagi pemberdayaan kebudayaan lokal untuk tujuan praktis. Inventarisasi mereka lebih mendekati tujuan memenuhi kebutuhan akademis.

Strategi yang sebaiknya ditempuh para praktisi untuk memberdayakan kebudayaan lokal dapat dilakukan dengan bermodalkan pada: (1) menghilangkan sikap skeptis terhadap keunggulan kebudayaan lokal untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, (2) empati terhadap masyarakat yang mempertahankan, melestarikan bahkan merevitalisasi kebudayaan lokalnya, (3) memberikan bantuan teknis dan perlindungan kepada kelompok masyarakat untuk melakukan pekerjaan tersebut, serta (4) mengupayakan pengembangan kebudayaan lokal agar semakin siap menghadapi persaingan dan tuntutan profesionalisme.

Paling tidak agenda pengembangan kebudayaan lokal akan meliputi empat bidang, yaitu: (1) benda budaya (arsitektur, perabot rumah tangga, seni lukis dan pahat, pakaian dan ornamen, makanan dan sebagainya), (2) upacara dan kepercayaan serta nilai budaya, (3) organisasi adat, dan (4) pengetahuan dan teknologi tradisional.

Benda Budaya

Pelestarian dan reproduksi benda budaya lokal merupakan pekerjaan konkrit yang keberhasilannya dapat diukur secara kuantitatif. Begitu banyak benda budaya lokal yang bisa menunjang

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dewasa ini, bisnis benda budaya memperlihatkan fungsi tersebut. Banyak barang antik dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan, bahkan tidak sedikit yang diekspor ke luar negeri. Gejala ini menunjukkan bahwa reproduksi benda antik mempunyai potensi yang besar untuk tujuan bisnis dan masyarakat lokal akan memperoleh keuntungan karena secara kultural mereka adalah yang memegang hak paten.

Patut diperhatikan bahwa masih banyak masalah yang belum terpecahkan. Masalah ini meliputi (1) banyak benda antik yang habis di pasaran sehingga kelak akan semakin sulit masyarakat memilikinya kembali, (2) banyak benda budaya lokal yang belum dipromosikan dalam sektor pariwisata dan perdagangan, dan (3) banyak benda budaya yang semakin punah karena tidak fungsional dengan kebutuhan pada masa kini dan tidak ada pihak yang berkepentingan untuk ikut melestarikannya.

Contoh kasus pertama terlihat pada keberadaan keris di Jawa. Budah sangat jarang empu yang mampu memproduksi keris asli. Benda-benda ini tidak begitu laku di pasar pariwisata, namun lambat laun akan berkurang di tanah Jawa karena sedikit demi sedikit akan terbawa ke luar negeri, sehingga nantinya untuk melihat keris mungkin orang harus masuk ke museum yang berada di daerah di luar pulau Jawa.

Contoh kasus kedua terlihat pada keberadaan makanan tradisional. Selain makin sedikitnya barang antik, banyak benda budaya yang belum dipromosikan ke dunia perdagangan dan pariwisata. Di Yogyakarta, kita mengenal makanan *geplak* yang terkenal sebagai makanan untuk oleh-oleh. Namun jajan pasar yang jumlahnya puluhan tidak berkembang menjadi komoditi unggulan.

Contoh kasus ketiga dapat diambilkan dari berbagai peralatan tradisional dalam berbagai suku bangsa di Indonesia. Kini alat itu tidak berguna tetapi reproduksi atas peralatan itu ke dalam citra yang lebih bernuansa etnik dan seni bisa menjadi populer dan laku di pasar sebagaimana produk kesenian orang Ainu di Jepang.

Upacara dan Kepercayaan

Upacara tradisional sering dikonotasikan dengan tradisi dalam masyarakat yang harus dihapus karena sering justru bersifat

pemborosan dan tidak sejalan dengan kehidupan modern. Belakangan ketika pariwisata budaya merebak sebagai komoditi yang menggiurkan, anggapan tersebut seperti telah ditarik. Upacara *Aloktadolo* di Toraja sering dituduh sebagai pemborosan, tetapi upacara tersebut ternyata sangat fungsional terhadap usaha beternak kerbau. Tanpa adanya tradisi *Aloktadolo* minat masyarakat terhadap usaha ternak kerbau akan rendah. Kerbau menjadi sangat berharga dalam masyarakat Toraja untuk binatang korban dan pesta kematian mengantarkan arwah kerabat ke haribaan. Terlepas dari fungsi ekonomi, upacara dan kepercayaan itu tidak boleh ditafsirkan secara negatif dengan menggunakan pandangan yang etnosentris.

Sesungguhnya kalau dianalisis, upacara dan kepercayaan tradisional sering mempunyai makna yang luas. Upacara tradisional sering berfungsi sebagai media mengekspresikan kepercayaan dan meningkatkan religiositas masyarakat. Beberapa upacara tradisional juga dapat membangkitkan solidaritas sosial antar warga, di samping untuk memberikan hiburan bagi masyarakat luas. Tradisi *tawur apem* di Jatinom, misalnya, merupakan aktivitas yang memenuhi berbagai fungsi seperti peringatan bulan Sura dalam kalender Islam-Jawa, dan penghormatan terhadap tokoh penyebar agama di wilayah ini, dan hiburan massal bagi masyarakat, wisatawan serta peziarah.

Usaha melestarikan upacara yang bersifat publik sangat perlu sekali karena mengandung nilai-nilai luhur yang penting bagi pengembangan kepribadian manusia. Tradisi ziarah di banyak tempat, misalnya merupakan peristiwa yang patut dilestarikan. Ziarah mengekspresikan suatu dialog manusia dengan leluhur dan Tuhan yang penting bagi manusia ketika masih hidup untuk memperoleh tuntunan dan ampunanNya. Peristiwa itu menjadi suatu ritus yang sakral dan dapat menjadi wahana yang penting bagi peningkatan religiositas umat.

Selain pelestarian kepercayaan, juga perlu diagendakan pelestarian nilai-nilai yang terkandung dalam ungkapan, tembang dan cerita rakyat dan mitologi. Nilai-nilai kehidupan masyarakat setempat memang sering tidak dituangkan dalam ajaran yang eksplisit tetapi diselubungkan dalam kreativitas seni tersebut. Inventarisasi ini dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi pengembangan nilai budaya melalui dokumentasi dan reproduksi cerita rakyat (Soemanto, 1992).

Organisasi Adat

Modernisasi telah menumbuhkan banyak organisasi sosial yang bersifat buatan dalam arti bersifat formal pada tata hubungan kerja kelembagaannya. Organisasi semacam itu berbadan hukum dan keanggotaannya bersifat kontraktual. Organisasi formal ini dapat menggeser organisasi adat yang bersifat informal dan kekeluargaan. Namun dalam kenyataannya, banyak organisasi adat di negara-negara berkembang tetap hidup di tengah menjamurnya organisasi formal. Organisasi adat itu dapat bersifat teritorial seperti perkumpulan orang sederhana maupun bersifat kepentingan sosial tertentu. Di Bali, orang mengenal subak sebagai organisasi yang menyatukan kepentingan petani pemakai air, dan banjar yang merupakan ikatan komunitas. Ikatan banjar berbeda dengan ikatan desa yang dibentuk oleh pemerintah untuk kepentingan administrasi pemerintahan.

Keberadaan organisasi adat sangat penting dalam masyarakat di pedesaan. Di Jawa yang paling maju dibandingkan luar Jawa, organisasi adat juga tetap berperan penting dalam pergaulan sosial. Ikatan komunitas seperti RT, RW dan RK serta kampung merupakan suatu organisasi adat yang berpengaruh terhadap pergaulan hidup seseorang.

Intervensi program pembangunan ke dalam masyarakat memerlukan pendekatan sosial dengan memperhatikan peran organisasi adat sebagai wahana sosialisasi program. Langkah seperti itu sebagian sudah dilakukan pemerintah. Dalam mengembangkan pertanian di Bali, misalnya, pemerintah memanfaatkan perkumpulan subak sebagai media penyebaran ide-ide pembangunan. Dalam menarik dukungan massa, pemerintah juga sering memanfaatkan organisasi adat sebagai media untuk melakukan pendekatan.

Konsep pemberdayaan organisasi adat untuk kepentingan masyarakat adalah tidak sekedar memanfaatkan organisasi adat itu sebagai media intervensi program, melainkan justru sebagai sasaran utama dari program pemberdayaan itu sendiri. Dengan demikian, pemerintah misalnya mengakui eksistensi lembaga adat rumah panjang di Kalimantan dan sekaligus melakukan pemberdayaan lembaganya.

Pengetahuan dan Teknologi

Telah disinggung di muka bahwa pembangunan merupakan transformasi masyarakat dari kehidupan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tradisional menuju modern. Selama proses pembangunan berlangsung banyak pengetahuan dan teknologi tradisional tergilas digantikan oleh pengetahuan dan teknologi modern. Klimatologi menggantikan *pranata mangsa*, obat menggantikan jamu, alat kontrasepsi menggantikan pantang berkala dan sebagainya. Pengetahuan ilmiah dan teknologi modern menghegemoni kesadaran para perencana pembangunan sehingga mereka melihat sangat beralasan untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang dipandang tidak rasional, mistis dan spekulatif serta subjektif.

Pengetahuan dan teknologi tradisional sebagai bagian dari kebudayaan lokal sesungguhnya juga mengandung kebenaran karena telah sekian lama teruji mampu untuk memecahkan masalah. Cerita tentang sawah *surjan* dan jamu-jamuan di atas menguatkan betapa pengetahuan lokal sangat logis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat bawah.

Agenda yang perlu diperhatikan dalam memberdayakan pengetahuan lokal meliputi dua hal. *Pertama*, inventarisasi pengetahuan lokal di berbagai bidang seperti soal tumbuhan dan tanaman, penyakit dan obat-obatan serta ilmu penyembuhan penyakit lainnya, seni batik dan tenun, keris, kecantikan dan sebagainya. Reproduksi pengetahuan lokal tersebut agar mudah diketahui oleh masyarakat dan diambil manfaatnya. *Kedua*, memberikan dukungan dan bantuan teknik terhadap berbagai upaya mengembangkan pengetahuan dan teknologi tradisional untuk tujuan praktis. Banyak fakta menunjukkan bahwa pengetahuan ini hanya dimiliki oleh segelintir orang dan akan hilang bila tidak dilestarikan. Kelak pengetahuan ini akan dibutuhkan untuk menjadi pengetahuan alternatif di samping pengetahuan ilmiah yang dominan.

Penutup

Bahasan di muka telah memaparkan keragaman wacana tentang eksistensi kebudayaan lokal dalam arti luas di tengah

modernisasi, khususnya di era Orde Baru dan globalisasi. *Pertama-tama* dapat diringkas di sini bahwa regim modernis telah memarginalisasi kebudayaan lokal yang telah mapan dalam masyarakat dan fungsional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat simbolik dan empiris dari kebutuhan yang bersifat identitas mereka sebagai suatu kelompok maupun yang bersifat ekonomi. Proses marginalisasi ini misalnya terlihat pada hancurnya sistem perladangan orang Dayak di Kalimantan.

Kedua, terlihat bahwa proses penguatan atas beberapa aktivitas kebudayaan lokal muncul di tengah modernisasi meskipun berjalan amat lambat. Proses penguatan itu merupakan suatu bentuk resistensi kelompok-kelompok masyarakat terhadap modernisasi yang tidak mengantarkan mereka menjadi manusia modern dan sejahtera ekonominya. Gejala ini telah dipaparkan di muka dengan mengambil kasus sistem sawah *surjan* di Yogyakarta.

Ketiga, terlihat bahwa proses modernisasi juga membuat sekelompok masyarakat semakin terasing dengan lingkungan kebudayaan-sosialnya. Kenyataan itu menyebabkan mereka pun kemudian berupaya kembali ke kebudayaannya sehingga mereka dapat membangun jati dirinya, dan mengembangkan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan ideologi komunitarian dan akrab dengan ekosistem yang lebih selaras dengan alam. Gejala penguatan ini terlihat dari munculnya kembali kesenian tradisional, produksi benda budaya orang Ainu, pertanian lestari dan komunitas baru orang Hawaii.

Wacana *keempat* mengungkapkan adanya upaya masyarakat mengembangkan kebudayaan lokal di tengah proses modernisasi karena menyadari akan kelemahan regim modernis dalam menawarkan kesejahteraan ekonomi melalui transformasi ekonomi dari pertanian ke industri serta aktivitas ekonomi yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi tradisional ke yang bersifat ilmiah dan modern. Gejala yang merepresentasikan wacana ini terlihat pada kasus merebaknya obat tradisional dan pertanian lestari.

Wacana *kelima* mengungkapkan bahwa globalisasi semakin membuka akses bagi penguatan kebudayaan lokal melalui komodifikasi kebudayaan lokal itu sendiri. Kasus pariwisata Bali dan pemasaran benda budaya yang bernilai seni merupakan contoh penguatan atas

kebudayaan lokal tersebut. Menjadi catatan di sini bahwa kiranya hanya dalam kasus pariwisata di Bali penguatan itu terwujud karena menghasilkan pariwisata budaya yang terus-menerus menyiapkan kelestarian dan penguatan kebudayaan lokal untuk pesona pariwisata.

Memperbincangkan wacana ke lima dan menegaskan kembali bahwa globalisasi memberikan secercah harapan bagi penguatan kebudayaan lokal sejauh masyarakat tersebut secara kreatif mampu memanfaatkan pasar global yang menjajakan komoditas kebudayaan. Kemampuan masyarakat lokal memasuki arena pasar global ini sangat tergantung pula dari pemerintah dalam menyikapi kebudayaan lokal. Pemerintah dalam era reformasi menempatkan kebudayaan sebagai milik masyarakat sehingga bukan wilayah yang dikontrol dan dikembangkan oleh pemerintah. Akan tetapi, bukan berarti pemerintah khususnya pemerintah daerah harus cuci tangan terhadap proses komoditisasi kebudayaan lokal yang bergerak tanpa partisipasi masyarakat pemilikinya. Hal ini karena kapitalisme selalu mampu secara kreatif mengkomoditisasikan kebudayaan lokal dengan melepaskannya dari ikatan dengan masyarakat pendukungnya. Cerita jamu ramuan Madura, misalnya, adalah sebuah produk jamu yang bernuansa kreativitas budaya lokal tetapi komoditisasi jamu tersebut berada dalam genggamannya pengusaha yang sedikitpun tidak berkaitan dengan produsen jamu dari Madura.

Munculnya wacana otonomi daerah kiranya harus mampu menggali potensi kebudayaan di tingkat lokal bukan hanya sebagai gerakan nostalgia dan impian masa lalu atas kebudayaan yang dimilikinya yang hancur di era modernisasi, tetapi gerakan yang membawa kebudayaannya menuju panggung ekonomi dunia sehingga secara ekonomi dan kultural menjadi kelompok yang berjaya di tengah pasar yang makin merajalela dan kompetitif.

Proses reformasi ke depan menuju otonomi daerah diharapkan akan menghargai keaneka-budaya sebagai identitas kultural bagi setiap kelompok etnik atau golongan. Kebijakan ini hendaknya mengarah pada semangat pluralisme dan multikulturalisme. Pluralisme akan menumbuhkan sikap koeksistensi dan toleran terhadap keaneka-budaya dan perbedaan budaya. Setiap kelompok diharapkan akan bebas mengembangkan budaya sendiri dan juga akan menghargai budaya kelompok lain secara sederajat

Keharmonisan akan muncul antar kelompok karena mereka saling menghormati budayanya. Adapun semangat multikulturalisme justru merangsang setiap warga komunitas budaya untuk mengembangkan kebudayaannya secara kreatif dengan menerima masukan dari kebudayaan milik komunitas yang lain.

Dengan semangat pluralisme dan multikulturalisme itu pengembangan kebudayaan lokal jelas tidak berarti harus dilawankan dengan era globalisasi dan nasionalisme. Reproduksi kebudayaan lokal dengan melakukan alienasi terhadap dunia yang makin mengglobal, karena reproduksi ini sejalan dengan semangat masyarakat global yang menghargai koeksistensi kebudayaan yang beragam dan kapitalis global mencumbu dan merasuki kebudayaan lokal untuk memperluas basis ekonomi pasar. Penguatan kebudayaan lokal nantinya bukan sebagai suatu resistensi terhadap globalisasi tetapi sebagai strategi memanfaatkan sistem pasar global. Pariwisata di Bali merupakan cerita sukses dalam mewujudkan strategi tersebut. Orang Bali tidak kehilangan kebudayaannya, tetapi lewat pariwisata mereka bisa mengembangkannya menjadi komoditas yang menarik di pasar pariwisata dunia. Di tingkat nasional, penguatan kebudayaan lokal bukan melahirkan separatisme, melainkan solidaritas nasional dan pembauran budaya yang kreatif sehingga pada gilirannya menjadi modal sosial-kultural dalam mewujudkan masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa. ***

Daftar Pustaka

- Dove, Michael R. (1985a.) *Perladangan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dove, Michael R. (1985b.) "Pendahuluan" dalam Michael R. Dove (ed) *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. xv-xviii.
- Foster, George. (1980.) *Traditional Society and Technological Change*. London: Holt and Rinehart.
- Friedman, Jonathan. (1994.) *Cultural Identity & Global Process*. London: Sage Publication.
- Geertz, Clifford. (1976.) *Involusi Pertanian*. Djakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Hudayana, Bambang. (1991.) "Konsep Resiprositas dalam Antropologi Ekonomi". *Humaniora*. No.3. Hal. 20-34.
- Ibrahim, Idi Subandy (ed). (1996.) *Ecstasy Gaya Hidup*. Jakarta: Kronik Indonesia Baru.
- Jameson, Frederic. (1991.) *Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism*. London: Verso.
- Koentjaraningrat. (1980.) *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia. Cetakan ke 7.
- Kodiran dan Bambang Hudayana. (1988.) *Peranan Wanita dalam Sawah Surjan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan.
- Nash, Manning. (1968.) *Primitive and Peasant Economic Systems*. San Francisco: Chandler Publication.
- Picard, M. (1993.) "Cultural Tourism in Bali. National Integration and Regional Differentiation". Dalam M., Hitchcock, V.T. King dan M.J. Parnwell, (eds), *Tourism in South-East Asia*. London: Routledge. Hlm. 71-98.
- Picard, M. (1996.) *Bali: Cultural Tourism and Tourist Culture*. Singapore: Archipelago Press.

Bambang Hudayana, *Kebudayaan Lokal dan Pemberdayaannya*

- Rienks, Adrian S. dan Purwanto Iskandar. (1985.) "Penyakit dan Pengobatan di Jawa Tengah: Persepsi Desa Kontra Persepsi Pemerintah" dalam Michael R. Dove (ed) *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 31-66.
- Spradley, James P. (1979.) *The Ethnographic Interview*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Suomanto, Bakdi. (1992.) *Cerita Rakyat dari Yogyakarta*. Yogyakarta: Gramedia.
- Sutapurwana, Bambang H. (1998.) *Pertanian Lestari: Model Pembangunan Alternatif (Studi tentang Kelompok-Kelompok Tani Lestari di Kabupaten Bantul)*. Tesis S2 Sosiologi UGM.
- Wilk, Richard. (1995.) "Learning to be Local Belise: Global Systems of Common Difference". Dalam D. Milner (ed). *Worlds Apart. Modernity Through the Prism of the Local*. London: Routledge. Hal. 110-113.
- White, Benjamin. (1989.) "Java's Green Revolution in Long-Term Perspective." *Prisma* 48: 66-81.